



## **EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM PENGUKURAN REFORMASI BIROKRASI TERINTEGRASI (SURABI) DALAM Mendukung PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA CIMAH**

**Anisa Oktavia Nur Azahra<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Reformasi birokrasi merupakan agenda nasional yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, salah satunya melalui aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI). Meskipun secara agregat nilai indeks reformasi birokrasi Kota Cimahi menunjukkan peningkatan, masih ditemukan permasalahan berupa kesenjangan capaian nilai reformasi birokrasi antar organisasi perangkat daerah, yang mengindikasikan belum meratanya pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aplikasi SURABI dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Duncan yang meliputi dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, serta didukung oleh teori *e-government* dan reformasi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian dilakukan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, serta Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SURABI efektif dalam meningkatkan transparansi, efisiensi pengukuran, dan proses evaluasi reformasi birokrasi, namun efektivitas tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan capaian antar perangkat daerah. Secara keseluruhan, aplikasi SURABI berkontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi.

**Kata kunci:** efektivitas, reformasi birokrasi, *e-government*, aplikasi, SURABI

### **Abstract**

*Bureaucratic reform is a national agenda aimed at realizing clean, effective, transparent, and accountable governance. Along with the development of information technology, the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) has become an important instrument in supporting bureaucratic reform at the local level, one of which is through the Integrated Bureaucratic Reform Measurement System (SURABI) application. Although the aggregate bureaucratic reform index of Cimahi City has shown an increase, problems remain in the form of disparities in bureaucratic reform scores among regional government agencies, indicating that the implementation*

*of bureaucratic reform has not been evenly distributed. This study aims to analyze the effectiveness of the SURABI application in supporting the implementation of bureaucratic reform in Cimahi City. The study employs Duncan's effectiveness theory, which consists of the dimensions of goal attainment, integration, and adaptation, supported by e-government and bureaucratic reform theories. This research uses a descriptive qualitative method, with data collected through semi-structured interviews, observation, and literature review. The research was conducted at the Organization Division of the Cimahi City Regional Secretariat, the Department of Communication and Informatics of Cimahi City, and the Cimahi City DPRD Secretariat. The results of the study indicate that the SURABI application is effective in improving transparency, measurement efficiency, and the evaluation process of bureaucratic reform; however, this effectiveness has not fully reduced performance disparities among regional government agencies. Overall, the SURABI application contributes positively to supporting the implementation of bureaucratic reform in Cimahi City.*

**Keywords:** *effectiveness, bureaucratic reform, e-government, application, SURABI*

## **PENDAHULUAN**

Reformasi birokrasi merupakan agenda nasional yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis SPBE, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengadopsi sebuah aplikasi bernama Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) sebagai salah satu instrumen pendukung dalam proses pengukuran dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Provinsi Jawa Barat, 2024). Melalui penerapan aplikasi SURABI, proses pengukuran reformasi birokrasi yang sebelumnya dilakukan secara semi-manual berbasis dokumen menggunakan *excel* dengan bukti fisik yang dikirim melalui *Google Drive* diharapkan dapat bertransformasi menjadi pengelolaan yang lebih sistematis, transparan, dan

terintegrasi, sekaligus memberikan gambaran capaian reformasi birokrasi yang lebih akurat di tingkat kota maupun organisasi perangkat daerah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi menunjukkan kemajuan positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang tercermin melalui peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi dari 81,26 pada tahun 2023 menjadi 86,29 pada tahun 2024, sehingga menempatkan Kota Cimahi pada urutan ke-8 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Cimahi, 2025). Kendati demikian, nilai indeks reformasi birokrasi yang secara agregat menunjukkan angka tinggi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pelaksanaannya di tingkat organisasi perangkat daerah.

Data nilai reformasi birokrasi perangkat daerah Kota Cimahi tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antar perangkat daerah, dimana beberapa OPD memperoleh kategori A dengan predikat sangat baik, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dengan nilai 88,43, sementara terdapat OPD yang masih berada pada kategori CC dengan predikat cukup, seperti Sekretariat DPRD Kota Cimahi dengan nilai 52,70.

Kesenjangan yang cukup lebar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat OPD mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi belum berlangsung secara merata. Padahal, aplikasi SURABI sebagai inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi seharusnya mampu memperkecil *gap* antar unit kerja, khususnya dalam konteks variasi nilai reformasi birokrasi antar OPD.

Sebagai suatu inovasi yang usianya relatif masih sangat muda, penelitian terkait efektivitas SURABI dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah, khususnya Kota Cimahi, masih sangat terbatas. Terlepas dari fenomena positif berupa kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi di tingkat kota, kesenjangan capaian nilai reformasi birokrasi pada tingkat OPD justru menegaskan pentingnya kajian yang lebih mendalam terkait aplikasi SURABI dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi.

Pengukuran efektivitas penerapan aplikasi SURABI dalam penelitian ini merujuk pada teori efektivitas menurut Duncan (Steers, 1985) yang terdiri

dari tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Teori efektivitas Duncan dipilih karena memiliki dimensi dan indikator yang jelas serta dinilai relevan untuk digunakan dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan suatu sistem atau program, khususnya dalam konteks penerapan aplikasi SURABI yang bertujuan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Lebih lanjut, teori efektivitas tersebut dihubungkan dengan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang meliputi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2018) berpendapat bahwa metodologi kualitatif dapat didefinisikan sebagai serangkaian tahapan penelitian yang kemudian memperoleh data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan, dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan efektivitas aplikasi SURABI (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi, dan Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Tim Reformasi Birokrasi di bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi sebagai OPD dengan nilai reformasi birokrasi tertinggi, dan Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi di

Sekretariat DPRD Kota Cimahi sebagai OPD dengan nilai CC kategori "cukup" berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi Kota Cimahi tahun 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada Miles dan Huberman (dalam Abdussamad, 2021) yang mencakup tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan ini menguraikan hasil penelitian mengenai efektivitas aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Cimahi. Analisis didasarkan pada teori efektivitas Duncan (Steers, 1985) yang mencakup tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Setiap dimensi dibahas berdasarkan aspek-aspek yang melekat di dalamnya dan dikaitkan dengan sasaran Reformasi Birokrasi, yakni transparansi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

### **Dimensi Pencapaian Tujuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SURABI berkontribusi dalam mendukung keteraturan perencanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. reformasi birokrasi telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi perangkat daerah, sehingga rencana kerja yang disusun secara periodik mengacu pada RPJMD dan Renstra yang memuat target reformasi birokrasi tersebut. Dalam konteks ini, aplikasi SURABI tidak berfungsi sebagai instrumen teknis penyusunan dokumen perencanaan, tetapi berperan sebagai mekanisme pengendali kualitas perencanaan melalui indikator reformasi birokrasi yang terstruktur. Keberadaan indikator yang jelas dalam aplikasi SURABI mendorong perangkat daerah untuk menyelaraskan rencana kerja dengan sasaran reformasi birokrasi.

Hal ini berdampak pada meningkatnya transparansi perencanaan, karena rencana kerja dan capaian reformasi birokrasi dapat ditelusuri secara sistematis. Selain itu, integrasi indikator reformasi birokrasi dalam rencana kerja turut memperkuat akuntabilitas birokrasi, karena setiap target yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian kinerja dan eviden yang relevan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SURABI dalam mendukung rencana kerja belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah. Pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi, aplikasi SURABI masih dipahami terutama sebagai instrumen evaluasi reformasi birokrasi, bukan sebagai rujukan dalam proses perumusan rencana kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi aplikasi SURABI terhadap aspek rencana kerja dipengaruhi oleh karakteristik mekanisme perencanaan di masing-masing perangkat daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aplikasi SURABI dinilai berperan dalam membantu perangkat daerah mencapai sasaran reformasi birokrasi, meskipun kontribusinya bersifat tidak langsung. Aplikasi SURABI dipahami sebagai sistem pengendali dan evaluasi yang mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui indikator-indikator terukur, bukan sebagai alat yang secara langsung menghasilkan kebijakan atau pelayanan publik. Dalam konteks transparansi dan pencegahan praktik KKN, aplikasi SURABI berkontribusi melalui keterbukaan proses pengukuran dan evaluasi reformasi birokrasi. Kewajiban pengungkapan data dan eviden secara sistematis menciptakan keterlacakan pelaksanaan program dan capaian kinerja. Keterbukaan nilai reformasi birokrasi antar perangkat daerah juga mendorong transparansi internal dan meminimalkan ruang terjadinya penyimpangan.

Terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, indikator pelayanan publik yang terintegrasi dalam aplikasi SURABI juga turut mendorong perangkat daerah untuk memenuhi standar pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, serta mengembangkan inovasi pelayanan. Meskipun aplikasi ini bersifat internal, dampak dari pemenuhan indikator tersebut dirasakan melalui perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Integrasi indikator reformasi birokrasi sebagai target kinerja

perangkat daerah memungkinkan aparatur untuk memahami posisi capaian kinerja secara objektif. Setiap capaian harus didukung dengan eviden yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akuntabilitas kinerja semakin menguat.

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dengan dukungan aplikasi SURABI menunjukkan adanya perbaikan signifikan dibandingkan mekanisme sebelumnya yang bersifat manual. Aplikasi SURABI memfasilitasi proses evaluasi yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri melalui integrasi indikator, eviden, dan hasil penilaian dalam satu sistem. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan pedoman yang telah ditetapkan, serta melibatkan tim evaluator dari berbagai *leading sector* dan pihak eksternal. Mekanisme ini mendukung terciptanya proses evaluasi yang objektif dan relatif bebas dari praktik KKN. Setiap nilai yang dihasilkan didasarkan pada kesesuaian antara eviden yang diunggah dengan implementasi di lapangan, bukan pada negosiasi. Hasil evaluasi yang dihasilkan melalui SURABI juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas birokrasi. Perangkat daerah dapat mengidentifikasi aspek pelayanan dan kinerja yang masih perlu diperbaiki, sehingga evaluasi tidak hanya bersifat penilaian, tetapi juga menjadi dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

### **Dimensi Integrasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi aplikasi SURABI telah dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan awal penerapan reformasi birokrasi berbasis sistem. Sosialisasi dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kemudian diteruskan kepada perangkat daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Namun, sosialisasi yang dilakukan masih lebih menekankan aspek teknis penggunaan aplikasi dibandingkan pemahaman substantif terhadap nilai-nilai Reformasi Birokrasi. Akibatnya, pemahaman aparatur terhadap tujuan transparansi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas birokrasi baru berkembang setelah tahap implementasi dan evaluasi berjalan. Selain itu, sosialisasi belum dirasakan secara merata di

seluruh perangkat daerah. Perbedaan tingkat pemahaman aparatur menunjukkan bahwa sosialisasi masih perlu diperkuat agar integrasi aplikasi SURABI dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan lebih optimal.

Dalam aspek pelaksanaan program, aplikasi SURABI berfungsi sebagai sistem pengukuran dan evaluasi yang mengintegrasikan indikator reformasi birokrasi, data pendukung, dan hasil penilaian. Keberadaan sistem ini mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih terarah dan sistematis. Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi SURABI berkontribusi terhadap transparansi, karena seluruh proses pengukuran dilakukan secara digital dan terbuka. Selain itu, indikator pelayanan publik yang terintegrasi dalam aplikasi mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi kendala, terutama terkait koordinasi antarperangkat daerah dan pengelolaan waktu. Kendala ini berdampak pada keterlambatan pengisian data dan pemenuhan eviden, sehingga integrasi pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal.

Kemudian, aplikasi SURABI memfasilitasi keberadaan sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui indikator, proses evaluasi, dan kewajiban penyampaian eviden. Pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan secara langsung terhadap aktivitas harian, tetapi melalui penilaian kinerja dan kepatuhan perangkat daerah terhadap indikator yang ditetapkan. Indikator seperti Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi sarana pengawasan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pemantauan hasil survei kepuasan masyarakat dan capaian kinerja turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **Dimensi Adaptasi**

Dimensi adaptasi dianalisis melalui dua aspek, yaitu peningkatan kapasitas SDM dan perubahan strategi. Dimensi ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan penerapan aplikasi

SURABI sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya, aplikasi SURABI tidak berfungsi sebagai sarana pelatihan atau pengembangan kompetensi secara langsung, melainkan sebagai sistem yang mendorong aparatur untuk memahami dan menyesuaikan kompetensinya dengan tuntutan reformasi birokrasi yang diukur melalui berbagai indikator kinerja.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui aplikasi SURABI terjadi melalui keterlibatan aparatur dalam proses pemenuhan dan penilaian indikator reformasi birokrasi seperti Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK. Proses tersebut mendorong aparatur untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar kerja, nilai-nilai integritas, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi. Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM yang difasilitasi melalui SURABI berdampak secara terpadu terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap nilai BerAKHLAK dan indikator kinerja mendorong terbentuknya perilaku kerja yang lebih profesional dan berintegritas. Kondisi ini berkontribusi pada pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah.

Penerapan aplikasi SURABI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi menunjukkan adanya pembaruan strategi dalam pelaksanaan program, namun pembaruan tersebut tidak berbentuk sebagai perubahan tujuan atau kebijakan reformasi birokrasi. Pembaruan strategi yang dimaksud lebih terlihat pada perubahan cara kerja, mekanisme pelaksanaan, serta pola pengendalian dan evaluasi reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah. Secara umum, data penelitian juga menunjukkan bahwa sebelum diterapkannya aplikasi SURABI, pelaksanaan reformasi birokrasi masih dilakukan dengan cara manual dan terpisah-pisah, dimana proses pengumpulan data, penyusunan laporan, serta pengunggahan *evidence* pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui berbagai media yang berbeda, seperti dokumen fisik, lembar kerja elektronik, dan penyimpanan

berbasis *cloud* yang tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengukuran dan evaluasi reformasi birokrasi menjadi kurang efektif, memerlukan waktu yang relatif lama, serta menyulitkan penelusuran capaian kinerja masing-masing perangkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pembaruan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi SURABI juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas akuntabilitas perangkat daerah di Kota Cimahi. Integrasi sistem yang diterapkan dalam aplikasi SURABI memungkinkan perangkat daerah untuk memantau capaian kerjanya secara langsung berdasarkan indikator reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menciptakan keterbukaan informasi internal antar perangkat daerah, sehingga proses penilaian tidak lagi bersifat tertutup atau sulit ditelusuri. Lebih jauh, keterukuran kinerja yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi SURABI mendorong perangkat daerah untuk secara aktif melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai masih kurang, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SURABI telah berperan efektif sebagai instrumen pendukung reformasi birokrasi. Melalui dimensi pencapaian tujuan, SURABI berkontribusi dalam mengendalikan kualitas rencana kerja dan memfasilitasi evaluasi reformasi birokrasi secara lebih terstruktur, objektif, dan terdokumentasi, sehingga mendukung tercapainya sasaran transparansi, pencegahan praktik KKN, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dari dimensi integrasi, penerapan SURABI mampu mengintegrasikan proses pengukuran, pelaksanaan, serta pengawasan reformasi birokrasi secara lebih sistematis, meskipun tingkat pemahaman aparatur terhadap substansi reformasi birokrasi dan intensitas pemanfaatan

aplikasi masih bervariasi antar perangkat daerah. Sementara itu, pada dimensi adaptasi, penggunaan SURABI mendorong peningkatan kapasitas aparatur dan perubahan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dari mekanisme manual menuju sistem berbasis digital yang lebih tertib dan terukur. Secara keseluruhan, keberadaan aplikasi SURABI memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi di Kota Cimahi, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi dan pemanfaatan yang lebih merata agar efektivitasnya dapat dioptimalkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Cimahi, K. (2025). *Apresiasi Capaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cimahi*. <https://cimahikota.go.id/berita/detail/83145-apresiasi-capaian-evaluasi-reformasi-birokrasi-pemerintah-kota-cimahi>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pub. L. No. 81 (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41084/perpres-no-81-tahun-2010>
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pub. L. No. 95 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Provinsi Jawa Barat, B. O. (2024). *Panduan SURABI 2.0 Jawa Barat*.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Erlangga.